

Bangunan Pesanggrahan akan Dijadikan TIC

Bangli (Bali Post) -

Pemkab Bangli melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli tengah merenovasi bangunan pesanggrahan yang berada di sebelah timur laut Pasar Kintamani. Bangunan yang direnovasi dengan anggaran Rp 610.119.000 tersebut akan dijadikan *Tourist Information Centre* (TIC).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Minggu (3/9) kemarin, atap bangunan sudah terlihat baru. Sejumlah besi penyangga untuk bangunan baru berupa toilet serta tempat penunjang lainnya sudah dipasang.

Kabid Bina Objek Disparbud Bangli I Wayan Bona mengungkapkan, renovasi dilaksanakan sejak Juli lalu. Diharapkan akhir tahun ini atau awal tahun 2018 bangunan itu sudah bisa difungsikan.

Bona menuturkan, pesanggrahan itu merupakan bangunan peninggalan Jepang. Dulunya bangunan tersebut digunakan oleh para pengunjung untuk melihat panorama alam di seputaran Gunung Batur. Karena lama terbengkalai, akhirnya Pemkab Bangli berinisiatif memanfaatkan bangunan tersebut sebagai TIC.

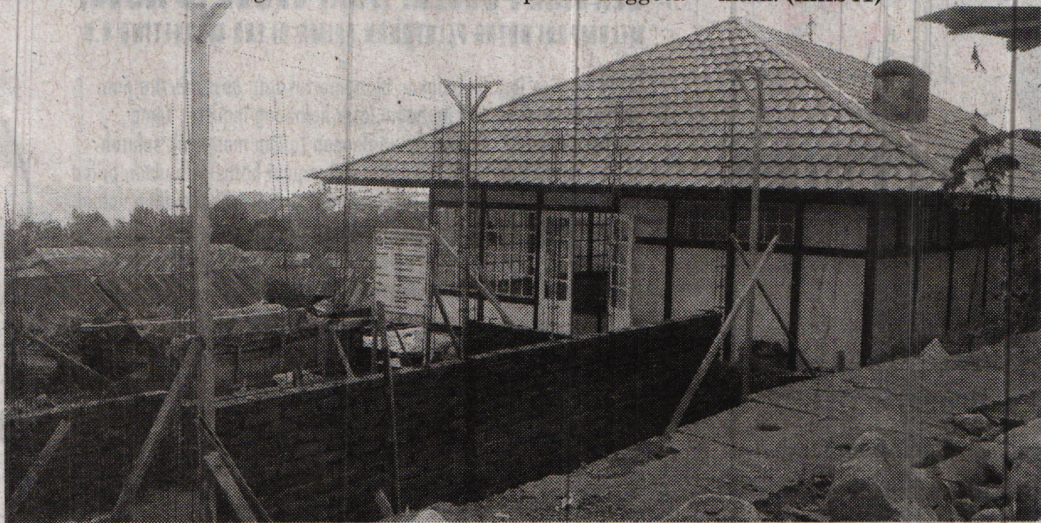
"Apabila ada pengunjung yang datang berlibur ke Kintamani, mereka bisa mencari informasi pariwisata di sana. Ke mana saja tempat pariwisata yang bisa dikunjungi, nanti semuanya ada di TIC ini. Pada intinya semua informasi pariwisata di Kintamani bisa dicari di TIC," ungkap Bona.

Pejabat asal Terungan itu menambahkan, untuk petugas yang bakal ditempatkan di TIC, pihaknya akan memaksimalkan peran anggota

organisasi kepariwisataan yakni *Local Working Group* (LWG) yang ada di masing-masing desa di Kintamani. Mereka inilah yang akan diminta mengelola TIC.

Maka dari itu pihaknya berharap LWG-LWG ini terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Nanti mereka bertugas untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pariwisata yang ada di Kintamani kepada pengunjung," jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya berharap wisatawan domestik maupun mancanegara jika ingin mengetahui informasi kepariwisataan di Kintamani agar mengunjungi TIC. Para pengunjung yang mengakses informasi di TIC diyakini tidak akan kebingungan mengeksplorasi pesona wisata Kintamani. (kmb41)

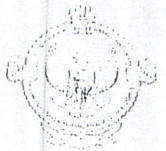


Bali Post/nan

DIRENOVASI - Bangunan pesanggrahan di dekat Pasar Kintamani direnovasi untuk dijadikan TIC.

Edisi : Senin, 4 September 2017

Hal : 8



Serahkan Hibah Rp 900 Juta di Banjar Gangga Sari Kapal

Bupati Giri Prasta Akui Sebuah Komitmen

GUNA mendukung pembangunan di Banjar Gangga Sari, Desa Adat Kepal, Kecamatan Mengwi, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah sebesar Rp 900 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan balai serbaguna dan panyenger di balai banjar setempat. Penyerahan hibah yang dilaksanakan, Sabtu (2/9) petang itu di Balai Banjar Gangga Sari itu juga dihadiri anggota DPRD Badung I Nyoman Satria, Camat Mengwi IGN Jaya Saputra, Lurah Kapal serta tokoh adat Desa Adat Kapal.

Tokoh masyarakat Mangku Made Karta selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Badung. Bantuan yang diterima, lanjut Mangku Karta, akan dimanfaatkan untuk pembangunan palingih, balai serbaguna serta panyenger Balai Banjar Gangga Sari. "Panyenger sudah ada yang keropos, dana ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan," katanya.

Tidak hanya itu, dalam sambutannya, Mangku Karta juga mengucapkan syukur atas program yang telah digulirkan oleh Bupati Badung, satu di antaranya adalah program kesehatan (KBS). "Ada warga kami yang kena sakit saraf, tidak bisa bangun. Sampai dipapah untuk berobat. Kini warga kami sudah sehat. Itu semua karena program KBS," sebutnya seraya berharap Bupati Badung Nyoman Giri

Prasta terus dapat berkarya dan menggulirkan program-program yang dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam tatap mukanya bersama masyarakat setempat menyampaikan program Pemerintah Kabupaten Badung. Mulai dari program kesehatan hingga pada program pendidikan. Bupati yang dikenal bares ini juga menyampaikan program peningkatan ekonomi adat melalui pembenahan-pembenahan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD).

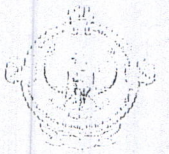
Mengenai pemberian hibah, kata Bupati Giri Prasta, merupakan sebuah komitmen untuk pembangunan seperti dalam konsep Tri

Hita Karana. Baik hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan. "Mulai pembangunan pura, yadnya baik upacara massal dan ekonomi kerakyatan juga sudah dibantu," kata Giri Prasta.

Pemberian hibah juga dilakukan untuk meringankan beban masyarakat, baik dalam kegiatan adat istiadat maupun kegiatan dalam keseharian dalam melakukan yadnya. Diakuinya, kegiatan masyarakat Bali telah banyak di bidang adat istiadat dan agama. "Saya tidak ingin waktu dan tenaga yang sudah banyak dikeluarkan ditambah lagi dengan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, kami berikan bantuan," imbuhnya. (ad128)



SERAHKAN HIBAH - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama anggota DPRD Badung I Nyoman Satria menyerahkan hibah sebesar Rp 900 juta di Balai Banjar Gangga Sari, Sabtu (2/9).



Baru 16 Mobdin Dikembalikan ✓

Oktober, Dewan Terima Tunjangan Transportasi

Gianyar (Bali Post) -

Mobil dinas (mobdin) anggota DPRD Gianyar belum semuanya dikembalikan. Anggota dewan pun diimbau untuk segera melakukan pengembalian, sebab Oktober mendatang, mereka mulai menerima tunjangan transportasi dan perumahan senilai puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gianyar Wayan Ardana, Minggu (3/9) kemarin, mengatakan hingga akhir Agustus, pihaknya memperkirakan baru 16 mobdin anggota DPRD Gianyar yang dikembalikan ke Bagian Aset. Bila sudah dikembalikan, puluhan mobil pelat merah tersebut akan didistribusikan ke sejumlah SKPD yang membutuhkan kendaraan dinas untuk operasional.

"Misalnya beberapa dinas baru itu belum ada mobil dan banyak dinas lain yang juga kekurangan kendaraan operasional. Termasuk Dinas Koperasi dalam pengawasan koperasi ke lapangan mereka juga membutuhkan mobil, tetapi belum punya," ungkapnya.

Dijelaskannya, pengembalian mobdin dewan harus sudah tuntas September ini. Disinggung terkait puluhan sopir yang sebelumnya mengawal kendaraan tersebut, Ardana memastikan penyaluran mobdin akan diikuti dengan penyaluran tenaga sopir. "Semestinya ini mengikuti, karena setiap

mobil itu pasti akan membutuhkan sopir," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Gianyar Ketut Astawa Suyasa mengamini jika pengembalian mobdin dewan harus tuntas bulan ini. Namun, ia mengakui, masih ada sejumlah proses yang dijalani untuk pencairan tunjangan anggota DPRD sebagai pengganti kendaraan dinas tersebut.

"Perbup untuk pembayaran tunjangan itu kan belum selesai, karena APBD Perubahan baru ketok palu. Sekarang untuk kajian appraisal kan baru di perubahan, makanya menunggu itu dulu. Di samping itu juga menunggu verifikasi dari provinsi. Begitu verifikasi selesai, appraisal diupayakan agar selesai juga," jelasnya.

Pihaknya pun berharap pengembalian mobdin tuntas sesuai yang ditargetkan sehingga tunjangan transportasi dan perumahan untuk anggota DPRD yang nilainya puluhan juta rupiah bisa cair pada Oktober mendatang. "September kemungkinan masih berproses

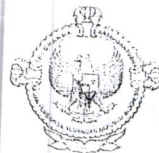
itu, makanya tunjangan kemungkinan bisa rapel di Oktober (tunjangan September dan Oktober - red)," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penarikan mobdin anggota DPRD Gianyar dilaksanakan untuk menjalankan PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak, Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembalian mobdin berlaku untuk 37 anggota DPRD Gianyar dari jumlah keseluruhan 40 orang. Ketua DPRD dan dua Wakil Ketua, sesuai ketentuan tetap menggunakan fasilitas mobdin.

Sekretariat Dewan telah memasang anggaran biaya transportasi untuk anggota dewan yang tak menggunakan mobdin. Per anggota dewan, anggarannya senilai Rp 12 juta per bulan. Tidak hanya tunjangan transportasi, mulai APBD Perubahan ini seluruh anggota DPRD Gianyar juga menerima uang tunjangan perumahan. Tunjangan yang dipasang untuk Ketua DPRD sebesar Rp 39 juta dan Wakil Ketua Rp 37 juta. Sementara untuk tiap anggota Dewan mendapat tunjangan Rp 35 juta. Kepastian mengenai besaran tunjangan tersebut kini masih menunggu proses pengesahan APBD Perubahan 2017. (kmb35)

Edisi : Senin, 4 September 2017

Hal : 9



Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Bencana

Dana Bencana Dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman

PIHAK Kejari Denpasar masih terus mengembangkan kasus dugaan penyimpangan dana bantuan bencana kebakaran Pasar Badung yang direlokasi ke eks Tiara Grosir Jalan Cokroaminoto, Denpasar. Informasi teranyar, dana yang nilainya miliaran rupiah itu dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman atau yang sebelumnya disebut Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Denpasar.

Kasipidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wira Kosadha yang dikonfirmasi terkait hasil gelar perkara atas kasus yang dibidik itu belum mau memberikan jawaban. Namun saat ditemui di Kejari Denpasar sebelumnya, Syahru membenarkan melakukan pulbaket dan puldata terkait dugaan penyimpangan dalam relokasi Pasar Badung yang terbakar beberapa waktu lalu tersebut.

Dana dari pemerintah pu-

sat sebesar Rp 2 miliar lebih itu rencananya untuk membuat pasar darurat untuk menampung para pedagang. Alurnya, BPBD Kota Denpasar membuat rekomendasi untuk kebakaran tersebut yang diajukan ke pusat. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Permukiman yang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk relokasi. Ada dugaan saat dilakukan relokasi pasar inilah terjadi penyimpangan. Selain penggunaan anggaran salah sasaran, penunjukan langsung CV Tunas Jaya sebagai rekanan dalam pembangunan lokasi relokasi kabarnya juga bermasalah. "Dugaan inilah yang saat ini dialami penyidik Kejari Denpasar," tandas sumber.

Selain mengamankan dokumen-dokumen dalam penganggaran dalam relokasi Pasar Badung, penyidik juga sudah memintai keterangan beberapa pejabat Pemkot Denpasar. (asa)